**LATAR BELAKANG PENELITIAN**

Maju mundurnya suatu bangsa akan ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya. Sekolah merupakan kunci utama dalam membentuk manusia yang berkualitas, melalui sekolah akan diperoleh pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Hal tersebut sejalan dengan fungsi pendidikan yang tertuang dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN), yang menyatakan bahwa fungsi pendidikan adalah mengembangkan kemampuan, meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia sebagai upaya mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Tujuan pendidikan adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab. Tujuan pendidikan akan tercapai secara efektif dan efisisien, jika sekolah ditunjang oleh dua faktor yaitu faktor internal yang berkaitan dengan pengelolaan sekolah dan faktor eksternal yaitu faktor masyarakat yang merupakan konsumen yang turut menentukan keberhasilan suatu pendidikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah MA IMTAQ masalah yang sering terjadi di MA IMTAQ dilatarbelakangi oleh banyak faktor. Pertama, kondisi lahan madrasah yang sulit untuk dikembangkan karena berada dilahan padat penduduk. Kedua, faktor kepemilikan (Yayasan) dari individu atau kelompok yang mendirikan madrasah kurang memperhitungkan pengembangan sesuai dengan kemajuan lingkungan masyarakat atau kebutuhan *stakeholder*. Ketiga, kondisi prasarana dan sarana yang dimiliki madrasah sangat terbatas, sehingga proses belajar mengajar madrasah menggunakan fasilitas apa adanya. Keempat, penyesuaian standar kurikulum dengan waktu yang tersedia atau jam kerja terbatas, sehingga rasio jam pembelajaran dengan tujuan pendidikan sulit dicapai. Satu sisi pengembangan kurikulum madrasah masih dihadapkan pemenuhan keseimbangan standar isi, baik ilmu agama maupun ilmu umum, sementara muatan lokal yang diprakarsai madrasah belum mencerminkan standar isi yang memadai. Kelima, permasalahan di MA IMTAQ terkait dengan kemampuan anggaran pendidikan untuk mendanai aktivitas pendidikan sangat terbatas, sehingga kinerja pengelolaan pendidikan berjalan apa adanya, seperti kurangnya prasarana dan sarana, kurang sumber belajar seperti buku-buku pelajaran yang lengkap, kurang sumber daya manusia yang berkualifikasi dan fasilitas laboratorium kurang memadai, sehingga MA IMTAQ terus berusaha memperbaiki kualitas terutama dalam pengelolaan keuangan. Dalam mewujudkannya perlu kerjasama dari berbagai pihak, karena keberhasilan suatu sekolah merupakan integrasi beberapa komponen, antara lain siswa, guru atau karyawan, orang tua, dan sarana prasarana yang baik dan

Pada tahun 2011 jumlah karyawan di MA IMTAQ sebanyak 12 orang sehingga dalam 1 tahun pembiayaan gaji pokok karyawan sebesar Rp. 25.560.000. Pada tahun 2012 jumlah karyawan di MA IMTAQ sebanyak 15 orang sehingga dalam 1 tahun pembiayaan gaji pokok karyawan sebesar Rp. 30.560.000. Pada tahun 2013 jumlah karyawan di MA IMTAQ sebanyak 17 orang sehingga dalam 1 tahun pembiayaan gaji pokok karyawan sebesar Rp. 35.650.000. Pada tahun 2014 jumlah karyawan di MA IMTAQ sebanyak 18 orang sehingga dalam 1 tahun pembiayaan gaji pokok karyawan sebesar Rp. 40.960.000 dan pada tahun 2015 jumlah karyawan di MA IMTAQ sebanyak 20 orang sehingga dalam 1 tahun pembiayaan gaji pokok karyawan sebesar Rp. 45.580.000

1. Pengembangan Laboratorium Komputer

Pada tahun 2011, MA IMTAQ belum memiliki laboratorium komputer sehingga dana yang dikeluarkan sebesar Rp. 21. 240.000. Pada tahun 2012-2015 laboratorium komputer terus dikembangkan sehingga dana yang dikeluarkan setiap tahun semakin menurun karena laboratorium komputer di MA IMTAQ sudah hampir memenuhi standar diperkirakan pada tahun 2016 MA IMTAQ akan memiliki laboratorium komputer yang memenuhi standar tingkat SMA/MA.

1. Pengembangan Standar Pengelolaan

Berdasarkan Permendiknas No. 19 Tahun 2007 Tentang Standar Nasional Pendidikan menjelaskan bahwa standar pengelolaan pendidikan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah adalah standar pengelolaan pendidikan untuk sekolah/madrasah berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pendidikan agar tercapai efisien dan eketivitas dalam penyelenggaraan pendidikan. Pengembangan standar pengelolaan di MA IMTAQ berkaitan dengan pelaksaan rapat-rapat dalam 1 tahun yang berkaitan dengan penyelenggaran pendidikan. Oleh karena itu, pengeluaran pengembangan standar pengelolaan setiap tahunnya tidak selalu sama sesuai dengan seringnya rapat yang dilaksanakan dalam satu tahun.

1. Pengembangan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pengembangan standar pendidik dan tenaga kependidikan di MA IMTAQ berkaitan dengan program-program yang berkaitan dengan pengembangan karyawan. Misalnya, pelatihan motivasi, pelatihan KTSP, pelatihan komputer, pelatihan tenaga perpustakaan, pelatihan tata usaha dan sebagainya. Oleh karena itu, pengeluaran pengembangan standar pendidik dan tenaga kependidikan setiap tahunnya selalu meningkat sesuai dengan kebutuhan sekolah dalam pengembangan karyawannya.

1. Pengembangan Standar Sarana dan Prasarana

Pengembangan standar sarana dan prasarana di MA IMTAQ berkaitan dengan peningkatan fasilitas sekolah seperti pembangan mesjid, pembangunan ruang kelas, pembangunan ruang guru dan sebagainya. Oleh karena itu, pengeluaran dana pengembangan standar sarana dan prasarana setiap tahun meningkat agar standar sarana dan prasarana dapat tercapai.

 MA IMTAQ berada dibawah naungan Yayasan Pendidikan Kesejahteraan Sosial (YPKS) IMTAQ sehingga pelaksanaan misi sekolah berjalan kurang baik ditandai oleh hampir tidak adanya perkembangan yang signifikan pada sarana prasarana penunjang pembelajaran, seperti media pembelajaran yang masih tradisional, ruang kelas yang kurang nyaman, meja dan kursi belajar yang tidak ergonomis dan toilet yang sangat kotor. Kurang profesionalnya guru, dan tata usaha dalam bekerja, contoh ada berbagai kegiatan (persiapan akreditasi, sertifikasi, Uji Kompetensi Guru, atau pendataan tunjangan dan lain sebagainya) yang dilakukan oleh guru-guru atau tata usaha yang menyebabkan terabaikannya proses pembelajaran. Selain itu, penggunaan biaya pendidikan di MA IMTAQ belum berjalan efektif dalam meningkatkan mutu pendidikan. Berbagai tantangan dihadapi oleh MA IMTAQ, untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada baik dari internal maupun eksternal maka MA IMTAQ memerlukan pengelolaan keuangan yang lebih optimal agar bisa menghadapi tantangan tersebut dan eksistensi madrasah tetap mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Berikut tabel SWOT perancangan anggaran partisipatif dan manajemen pembiayaan pendidikan di MA IMTAQ.

 Berbagai upaya telah dilakukan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Upaya tersebut diharapkan sesuai dengan rencana yang disusun Renstra MA IMTAQ 2013-2018. Dalam mengukur mutu pendidikan, sekolah harus melakukan Evaluasi Diri Sekolah (EDS). Dengan EDS sekolah bisa mengukur pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) sekolahnya sendiri. Begitupun MA IMTAQ, telah mengukur kondisi sekolahnya sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Berdasarkan EDS yang telah dibuat lembaga, standar nasional pendidikan belum tercapai . Dari delapan komponen standar nasional pendidikan dapat disimpulkan terdapat satu komponen yang pencapaiannya masih rendah yaitu standar pembiayaan pendidikan yaitu sebesar 61%. Standar Nasional Pendidikan sebagai acuan pendidikan bermutu sehingga, dalam mewujudkan standar nasional pendidikan yang terdiri dari 8 standar dibutuhkan sebuah program dalam perancangan anggaran yaitu dengan perancangan anggaran partisipatif. Dalam SNP juga disebutkan standar pembiayan, terlihat dalam gambar tersebut MA IMTAQ belum mampu memenuhi standar pembiayaan. Oleh karena itu, penggunaan pembiayaan pendidikan perlu diketahui terutama mengenai manajemennya (Armida, 2012:5). Dalam penerapannya manajemen pembiayaan pendidikan di MA IMTAQ belum maksimal, karena belum terdapat evaluasi pelaporan tanggung jawab.

Berdasarkan pemahaman-pemahaman tersebut, dapat diketahui pelaksanaan perancangan anggaran partisipatif dan manajemen pembiayaan pendidikan MA IMTAQ berjalan kurang baik sehingga, membuat penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai perancangan anggaran partisipatif dan manajemen pembiayaan pendidikan di MA IMTAQ Soreang Kabupaten Bandung agar dapat meningkatkan mutu pendidikan, sehingga judul yang diangkat adalah **“Perancangan Anggaran Partisipatif dan Manajemen Pembiayaan Pendidikan Dalam Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan di MA IMTAQ Soreang Kabupaten Bandung.”**

**KAJIAN PUSTAKA**

 **Manajemen**

GR Terry (2006:2) mengemukakan: *management is a distinct process consisting of planning, organizing, actuating, and controlling performed to determine and accomplish stated objective by the use of human being and other resources*.

Berdasarkan pengertian tersebut, manajemen terdiri dari proses:

1. Perencanaan,
2. Pengorganisasian,
3. Pelaksanaan,
4. Pengendalian.

 **Manajemen Keuangan**

Wijaya (2009:12) menyatakan manajemen keuangan merupakan manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan, sedangkan fungsi keuangan merupakan kegiatan utama yang harus dilakukan oleh mereka yang bertanggung jawab dalam bidang bidang tertentu. Fungsi manajemen keuangan adalah menggunakan serta mendapatkan dana.

 **Pengertian Anggaran**

Mardiasmo (2009:61) mengemukakan, anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial.

**Partisipasi Anggaran**

Brownell dalam Tjahjanti (2005:35), mengemukakan partisipasi anggaran adalah suatu proses dimana individu-individu terlibat di dalamnya dan mempunyai pengaruh pada penyusunan target anggaran yang kinerjanya akan dievaluasi dan kemungkinan akan dihargai atas pencapaian target anggaran mereka.

**Manajemen Pembiayaan Pendidikan**

Manajemen Pembiayaan dalam lembaga pendidikan berbeda dengan manajemen pembiayaan perusahaan yang berorientasi profit atau laba. Organisasi pendidikan dikategorikan sebagai organisasi publik yang nirlaba (*non-profit*). Oleh karena itu, manajemen pembiayaan memiliki keunikan sesuai dengan misi dan karakteristik pendidikan. Manajemen dalam pendidikan dapat diartikan sebagai aktivitas memadukan sumber-sumber pendidikan agar terpusat dalam usaha mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan sebelumnya (Pidarta, 2005 : 4).

**Mutu Pendidikan**

 Pengertian mutu dalam konteks pendidikan mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. proses pendidikan yang bermutu melibatkan berbagai input seperti bahan ajar, metode pembelajaran, sarana sekolah, dukungan administrasi dan sarana prasarana serta sumber daya lainnya untuk penciptaan suasana sekolah yang kondusif. Mutu dalam pendidikan untuk menjamin kualitas input, proses, produk/output dan *outcome* sekolah sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas sekolah.

**METODOLOGI PENELITIAN**

**Perspektif Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawan dari eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2013:187).

**Sumber Data Penelitian**

Data sekunder diperoleh dari situs internet dari lembaga/ institusi yang kredibel sedangkan data primer adalah data asli yang dikumpulkannya sendiri oleh penulis untuk menjawab masalah risetnya secara khusus. Data primer diperoleh dari observasi, wawancara dan kuesioner serta dokumentasi.

**Teknik Pengumpulan Data**

 Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara dan kuesioner, dokumentasi.

**HASIL PENELITIAN**

1. Perancangan anggaran partisipatif di MA IMTAQ sudah dilaksanakan sejak tahun 2013 namun ada tahapan yang belum dilaksanakan yaitu tidak dilaksanakan *consultation* dan *joint decision making* dalam pengambilan keputusan sehingga pihak sekolah tidak pernah melibatkan pihak yayasan, guru dan TU dalam penyusunan anggaran dan pengambilan keputusan. Perancangan anggaran partisipatif hanya dilakukan dalam penyusunan sasaran dan program kerja sekolah maka dalam pelaksanaannya perancangan anggaran partisipatif di MA IMTAQ perlu dikaji lebih dalam.
2. Manajemen pembiayaan pendidikan di MA IMTAQ sudah dilaksanakan sejak tahun 2009 dimulai dari :
3. Proses pengganggaran pembiayaan pendidikan dimulai dengan diadakannya rapat kerja tahunan (RAKER), yang membahas mengenai besarnya estimasi dana.
4. Sumber dan alokasi anggaran pendidikan berasal dari dana masyarakat seperti iuran SPP, bantuan dana dari luar/hibah, dan dana BOS. Dana di alokasikan untuk membiayai program-program sekolah.
5. Pengawasan dan pertanggungjawaban pembiayaan pendidikan dilakukan oleh Yayasan IMTAQ dan Kemenag Kab. Bandung Bagian Pendidikan Madrasah. Pertanggungjawaban pembiayaan sekolah hanya diserahkan kepada Komite Sekolah dan Kemenag Kab. Bandung tidak melibatkan pihak Yayasan IMTAQ, sehingga penerapan manajemen pembiayaan pendidikan di MA IMTAQ belum optimal, perlu dikaji lebih dalam.
6. Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di MA IMTAQ adalah sebagai berikut :
7. Terdapat proses atau alur pencairan dana dalam program kerja yang tidak mudah membuat sekolah kesulitan dalam memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan sesegera mungkin untuk digunakan oleh siswa.
8. Pihak-pihak yang terkait dapat bekerjasama dengan baik dan tenaga kependidikan yang sudah professional, sehingga dalam melakukan penyusunan dan pelaporan dapat dilakukan dengan lancar.
9. Perancangan anggaran partisipatif dan manajemen pembiayaan pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di MA IMTAQ
10. Perancangan anggaran partisipatif dalam upaya meningkatkan upaya meningkatkan mutu pendidikan di MA IMTAQ dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
11. Sekolah memberi informasi tujuan dan anggaran kepada public secara transparan.
12. Sekolah mendirikan mekanisme untuk mengumpulkan informasi tentang preferensi warga sekolah.
13. Warga sekolah memberikan informasi tentang preferensi dan kebutuhan mereka kepada panitia anggaran
14. Panitia anggaran mengidentifikasi program - program dan kegiatan yang diajukan.
15. Panitia anggaran bersama dengan warga sekolah melalui perwakilannya memilih program dan pengalokasian sumber daya.
16. Warga sekolah melakukan pengawasan terhadap program/Kegiatan.
17. Manajemen pembiayaan pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di MA IMTAQ dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
18. Pengganggaran pembiayaan pendidikan dilakukan sebelum masuk tahun ajaran baru sedangkan untuk mengevaluasi pembiayaan disusun rencana anggaran pembelanjaan sekolah yang dilakukan dalam rapat kerja dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan di sekolah.
19. Sumber alokasi dana dikumpulkan dengan mengadakan kegiatan promosi sekolah untuk memperoleh smber dana dari donator dan masyarakat.
20. Pengawasan dan pertanggungjawaban pembiayaan pendidikan melibatkan komite dalam proses kegiatan pengawasan dan melibatkan pihak yayasan dalam proses pertanggungjawaban.

**KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

* + - 1. Perancangan anggaran partisipatif di MA IMTAQ sudah dilaksanakan sejak tahun 2013 namun ada tahapan yang belum dilaksanakan yaitu tidak dilaksanakan *consultation* dan *joint decision making*
			2. Manajemen pembiayaan pendidikan di MA IMTAQ sudah dilaksanakan sejak tahun 2009 dimulai dari :
1. Proses pengganggaran pembiayaan pendidikan dimulai dengan diadakannya rapat kerja tahunan (RAKER), yang membahas mengenai besarnya estimasi dana.
2. Sumber dan alokasi anggaran pendidikan berasal dari dana masyarakat seperti iuran SPP, bantuan dana dari luar/hibah, dan dana BOS. Dana di alokasikan untuk membiayai program-program sekolah.
3. Pengawasan dan pertanggungjawaban pembiayaan pendidikan dilakukan oleh Yayasan IMTAQ dan Kemenag Kab. Bandung Bagian Pendidikan Madrasah. Pertanggungjawaban pembiayaan sekolah hanya diserahkan kepada Komite Sekolah dan Kemenag Kab. Bandung tidak melibatkan pihak Yayasan IMTAQ,

**REKOMENDASI**

 Rekomendasi dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Berkaitan dalam pelaksanaan perancangan anggaran partisipatif hendaknya sekolah melaksanakan penyusunan anggaran menggunakan pendekatan *New Public Management* dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam penyusunan anggaran.
2. Berkaitan dalam pelaksanaan manajemen pembiayaan pendidikan mengenai tahapan proses pengganggaran pembiayaan pendidikan hendaknya sekolah mengikuti kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pedoman penyusunan RAPBS dengan mengikutsertakan guru dan komite. Karena guru dan komite juga mempunyai peranan penting dalam penyusunan RAPBS dan guru lebih mengetahi kondisi kelas, kebutuhan siswa serta kebutuhan dalam proses belajar mengajar sedangkan dalam tahapan pengawasan dan pertanggungjawaban pembiayaan pendidikan hendaknya sekolah melaksanakan proses pertanggungjawaban guna terciptanya pembiayaan pendidikan yang baik serta terciptnya transparansi keuangan sekolah.
3. Berkaitan dengan cara mengatasi hambatan dalam peningkatan mutu pendidikan hendaknya sekolah melaksanakan pengalokasian anggaran harus sesuai dengan kebutuhan dan harus diminimalisir pengeluaran sekolah agar tidak terjadi pemborosan.
4. Berkaitan dalam mengevaluasi pelaksanaan perancangan anggaran partisipatif dan manajemen pembiayaan pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan hendaknya dengan cara :
	1. Kefektifan pelaksanaan perancangan anggaran partisipatif, diukur dari reaksi orangtua dan komite sekolah dalam mengikuti pelaksanaan perancangan anggaran partisipatif dan manajemen pembiayaan pendidikan seperti penyusunan anggaran menggunakan angket/daftar isian yang diisi oleh orangtua dan komite sekolah.
	2. Dampak perancangan anggaran partisipatif dan manajemen pembiayaan pendidikan dapat dievaluasi oleh sekolah dengan cara bimbingan (*coaching*) dengan warga sekolah.
	3. Meningkatkan peranan orang tua, komite sekolah dan yayasan dalam tindaklanjut perancangan anggaran partisipatif dan manajemen pembiayaan pendidikan secara konsisten dan tepat waktu.

**DAFTAR PUSTAKA**

Armida. (2012). **Studi tentang Sistem Penganggaran dan Efektifitas Penggunaan Biaya Pendidikan serta Dampaknya terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan Aliyah di Kota Jambi.**

Checland, Peter,(1990), ***Soft System Methodology In Action***. England: John

 Willey and Sons

Danumihardja, Mintarsih (2007), **Manajemen Keuangan Sekolah Pada SMP Negeri Dan Swasta Di Kota Cirebon : Studi keterkaitan Level Biaya dan Mutu Lulusan**,

Departemen Pendidikan Nasional.(2005). **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional**

Durachman (2006), **Analisis Proses Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Di Dinas Kesehatan Provinsi Jambi**

Gaspersz, Vincent, (2012), ***All-in-one Strategic Management***,Vinchristo Publication, Bogor

Harahap, Sofyansyafri,(2005). ***Budgeting* Peranggaran: Perencanaan LengkapUntuk Membantu Manajemen ,** Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada

Mardiasmo, (2009)**, Akuntansi Sektor Publik**, Andi, Yogyakarta

Mulyadi, (2007)**, Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen,** Edisi 3, Salemba Empat, Jakarta

Nafarin, M (2007), **Penganggaran Perusahaan,** Edisi Ketiga, Salemba Empat,Jakarta

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun (2008) Tentang **Pendanaan Pendidikan 2008**. Jakarta

Pidarta, Made.(2005), **Manajemen Pendidikan Indonesia** (Edisi Revisi). Jakarta: PT Rineka Cipta

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. **Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Keempat)**. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Sattar, Tehmina (2012), ***A Sociological Analysis of Lack of Stakeholders***

***Participation as a Major Construct of Low Quality Education in Pakistan***,

Shah, Anwar (2007),***Participatory Budgeting: Public Sector and Accountability Series*,** The World Bank, Washington DC, 247

Shall, Andriane (2007), ***Sub-Saharan Africa’s Experience with Participatory Budgetting***

Sugiyono,(2013)**, Memahami Penelitian Kualitatif** ,Alfabeta, Bandung

Suryosubroto,(2005), **Manajemen Pendidikan Sekolah (Edisi Revisi)**. Jakarta: PT Rineka Cipta

Sutomo, (2007), **Manajemen Sekolah**. Semarang: UPT MKK UNNES

Tjahjanti, Rosalia Dwi Fadma,(2005), **Karakteristik Anggaran, Instrumentalitas Anggaran, Dan Partisipasi Anggaran Sebagai Faktor Yang Mempengaruhi Prestasi Kerja Manajer,** Jurnal Administrasi Bisnis , 1,2,36-43

UN HABITAT,(2008),”***Participatory Budgeting In Africa***”

Wijaya, David, (2009), **Implikasi Manajemen Keuangan Sekolah Terhadap Kualitas Pendidikan**, Jurnal Pendidikan Penabur,8,13, 30-96,